

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah republik indonesia berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap stunting melalui peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi ini mengatur upaya pemerintah untuk menurunkan stunting di Indonesia.

Kondisi yang dikenal sebagai "stunting" biasanya terjadi ketika pertumbuhan fisik anak-anak terhambat karena kurangnya asupan nutrisi selama periode yang berkepanjangan. Masalah ini terutama terjadi dalam 1.000 hari pertama kehidupan, meliputi masa kehamilan hingga anak mencapai usia dua tahun. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap stunting termasuk lingkungan yang tidak bersih dan asupan makanan yang tidak mencukupi.¹

Stunting memiliki potensi untuk berlangsung lama serta memengaruhi perkembangan otak dan kemampuan kognitif anak, yang pada akhirnya bisa mengakibatkan masalah kesehatan dalam waktu yang lama. Keadaan ini dapat terjadi ketika janin masih berada di dalam rahim dan mungkin baru terlihat ketika

¹ S Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

anak berusia dua tahun atau lebih.² Dampak stunting bisa bertahan dalam waktu yang panjang, menghambat perkembangan otak dan kognisi anak, yang berujung pada masalah kesehatan jangka panjang.

Meski gejala ini umumnya baru terlihat saat anak berusia dua tahun, stunting dapat terjadi sejak janin masih dalam kandungan. Stunting adalah masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko penyakit, kematian, dan keterlambatan dalam perkembangan motorik dan mental. Kondisi ini terjadi saat pertumbuhan tidak diimbangi dengan pertumbuhan kejar, sehingga terjadi penurunan dalam pertumbuhan anak-anak.³

Kesehatan memiliki peran yang sangat krusial bagi individu. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mengartikan kesehatan sebagai suatu keadaan yang mencakup faktor fisik, mental, spiritual, serta sosial, yang memungkinkan individu untuk menjalani hidup secara produktif dari segi sosial maupun ekonomi.⁴ Secara umum, H. L. Blum mengategorikan faktor-faktor yang berdampak pada kesehatan individu, komunitas, dan masyarakat ke dalam empat kelompok: genetik, kondisi lingkungan, perilaku individu, dan layanan kesehatan.⁵ Oleh karena itu, cara untuk mencegah stunting adalah dengan meningkatkan kesehatan dan gizi ibu selama kehamilan, memberikan asupan gizi

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Topik Kesehatan Stunting 29 (2), (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.1145/379277.312726>.

³ Yunifar Tsamarah Allya, “COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PENERAPAN PERWALI NO 79 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA SURABAYA” 3, no. 04 (2023): 31–41.

⁴ “Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” n.d., LN. 2009/No. 144, TLN NO. 5063, LL SETNEG : 77 H.

⁵ Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku*.

yang memadai pada anak-anak sejak bayi, dan meningkatkan kebersihan lingkungan

Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, tingkat stunting pada anak balita di provinsi tersebut pada tahun 2022 adalah 22,4%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 24,2% pada periode yang sama. Ada 7 kabupaten di Jambi dengan prevalensi stunting yang melampaui rata-rata provinsi, sedangkan 4 kabupaten lainnya memiliki angka yang lebih rendah dari rata-rata.

Pada tahun 2022, persentase anak balita yang mengalami stunting di Kabupaten Muaro Jambi adalah yang tertinggi di Provinsi Jambi, dengan angka mencapai 27,2%. Ini berarti bahwa satu dari empat anak di daerah ini mengalami stunting. Di sisi lain, tingkat stunting terendah tercatat di Kota Jambi dengan angka 17,4%.

Tabel 1.1 Data Stunting Provinsi Jambi Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Presentase Klasikal	Ket
Muaro Jambi	27,2%	Tertinggi
Kerinci	26,7%	Sedang
Tebo	26,2%	Sedang
Tanjung Jabung Timur	25,6%	Sedang
Sungai Penuh	25%	Sedang
Batanghari	24,5%	Sedang
Bungo	22,9%	Sedang
Sarolangun	21,4%	Sedang

Merangin	19,8%	Sedang
Tanjung Jabung Barat	19,7%	Sedang
Kota Jambi	17,4%	Terendah

Sumber :Dinas Kesehatan Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi menempati posisi teratas dalam jumlah penderita stunting di Provinsi Jambi, sesuai dengan data yang disebutkan. Di wilayah ini, kasus stunting tersebar di berbagai puskesmas yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi.

Pada Kecamatan Mestong, terdapat sebanyak 129 anak penderita stunting pada tahun 2020 dan 99 anak Penderita Stunting di tahun 2021. Selanjutnya di Kecamatan Sungai bahar terdapat total 41 anak penderita stunting pada tahun 2020 dan sebanyak 9 anak di tahun 2021. Kecamatan Bahar Utara mencatat bahwa pada tahun 2020 terdapat 46 kasus anak yang menderita stunting, dan pada tahun 2021 jumlah tersebut meningkat menjadi 84 kasus.

Tabel 1.2 Jumlah Penderita Stunting Di Kabupaten Muaro Jambi

No	Kab. Ma Jambi	Puskesmas	2020 (Tb)		2021 (Tb)	
	Kec.		Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah
1	Mestong	Tempino	6	15	0	6
2		Pondok Meja	32	76	24	69
Jumlah			38	91	24	75
3	Sungai Bahar	Sei Bahar 1	1	27	1	4
4		Sei Bahar IV	0	13	0	4
Jumlah			1	40	1	8
5	Bahar Utara	Sungai Bahar VII	11	26	3	13
6		Talang Bukit	3	17	14	54
7		Markanding	0	3	0	0
Jumlah			14	46	17	67
8	Kumpeh Ulu	Kasang Puduk	4	10	3	5
9		Muara Kumpeh	0	1	0	4
Jumlah			4	11	3	9
10	Sungai Gelam	Tangkit	1	1	0	8
11		Kebon IX	1	7	0	7
Jumlah			2	8	0	15
12	Kumpeh	Tanjung	6	2	1	9
13		Puding	2	1	0	11
Jumlah			8	3	1	20
14	Maro Sebo	Jambi Kecil	4	28	0	0
Jumlah			4	28	0	0
15	Taman Rajo	Kemingking Dalam	0	2	0	1
Jumlah			0	2	0	1
16	Jambi Luar Kota	Simpang Sei Duren	2	0	0	0
17		Penyengat Olak	0	23	4	22

18		Pir Li Bajubang	3	3	0	1
Jumlah			5	26	4	23
19	Sekernan	Tantan	4	33	0	1
20		Suko Awin Jaya	0	1	0	4
21		Sengeti	0	0	0	4
22		Sekernan Ilir	1	2	1	2
Jumlah			5	36	1	11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022

Bupati Muaro Jambi menerbitkan regulasi dengan Nomor 2 Tahun 2023 yang bertujuan mempercepat pengurangan prevalensi stunting di daerah Muaro Jambi. Kebijakan tersebut mendukung strategi nasional dalam mempercepat upaya penanganan stunting, yang bertujuan untuk mencapai target penurunan angka stunting yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen yang serius dan konsisten dari pemerintah daerah dalam melindungi anak-anak di bawah lima tahun dari risiko pertumbuhan yang terhambat.

Upaya mempercepat penurunan stunting menuntut intervensi khusus, intervensi sensitif, serta dukungan teknis yang diterapkan melalui pendekatan yang menyeluruh, terintegrasi, dan berkualitas tinggi. Untuk mencapai hasil ini, diperlukan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Komitmen tersebut diimplementasikan melalui pendekatan yang terkoordinasi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.⁶

⁶ “Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Muaro Jambi,” n.d.

Untuk mengurangi angka stunting yang tinggi di Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah menerapkan *Collaborative Governance*. Metode ini mengutamakan kolaborasi dan keterlibatan berbagai pihak atau pemangku kepentingan yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen. Pendekatan *Collaborative Governance* memberikan kesempatan bagi berbagai pihak dengan beragam latar belakang dan kepentingan untuk bersinergi dalam menyelesaikan masalah atau mengelola proyek.

Keberhasilan metode ini bergantung pada keterlibatan aktif dan kerjasama yang kokoh di antara semua pemangku kepentingan yang turut serta. Tujuannya adalah untuk menciptakan solusi yang lebih holistik, inklusif, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai pengetahuan, sumber daya, dan keahlian yang dimiliki oleh para pihak terlibat.

Dalam konteks *Collaborative Governance*, para pemangku kepentingan yang biasanya berpartisipasi mencakup lembaga pemerintah, LSM, masyarakat sipil, sektor swasta, serta individu atau kelompok masyarakat lainnya⁷. Mereka bekerja sama untuk merumuskan kebijakan, merencanakan proyek, atau mengatasi masalah tertentu dengan mengadopsi pendekatan yang demokratis, transparan, dan inklusif⁸.

Salah satu contoh bentuk *Collaborative Governance* di Kabupaten Muaro Jambi adalah kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan Tanoto Foundation. Eddy Henry, yang memimpin bidang Pendidikan dan

⁷ Rio Yusri Maulana, "Collaborative Governance in the Implementation of E-Government-Based Public Services Inclusion in Jambi Province, Indonesia," *Journal of Governance* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7317>.

⁸ Maratun Saadah, "Religious Organization Capacity in Governing Social Distancing in Indonesia," *Kontekstualita* 37, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.30631/37.2.79-98>.

Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) di Tanoto Foundation Indonesia, mengungkapkan bahwa Tanoto Foundation memiliki empat fokus utama dalam program percepatan pengurangan stunting di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi. Fokus-fokus ini mencakup beberapa aspek: bimbingan teknis yang meliputi intervensi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP), jaminan pelaksanaan Aksi Konvergensi, peningkatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta dukungan dalam pengawasan dan evaluasi.⁹

Di Kabupaten Muaro Jambi, sebuah bentuk keberhasilan dari *Collaborative Governance* telah terwujud melalui kolaborasi antara sektor swasta, kecamatan, desa, dan para tenaga kesehatan di masing-masing wilayah. Salah satu program yang dijalankan adalah kegiatan penimbangan dan pengukuran tinggi badan anak secara teratur di posyandu, yang dilakukan secara serentak untuk mendeteksi dini kasus stunting pada anak-anak

Namun, ternyata dari program *Collaborative Governace* yang telah dijalankan, angka stunting di Kecamatan Bahar Utara masih cukup tinggi. Lalu apakah program *Collaborative Governance* yang sudah berjalan ini sudah dapat dikatakan berhasil apabila kenyataannya kasus stunting masih tinggi di beberapa kecamatan. Selain bentuk *Collaborative Governance* yang telah disebutkan, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan model *Collaborative Governance* yang diimplementasikan di Kabupaten Muaro Jambi dan sejauh mana penerapannya di Kecamatan Bahar Utara.

⁹ Alexander. B Hilda, "Gandeng Dua Pemkab Di Jambi, Tanoto Foundation Tingkatkan Kualitas Pendidikan Dasar," *Kompas.Com*, June 16, 2023, <https://lestari.kompas.com/read/2023/06/16/100000486/gandeng-dua-pemkab-di-jambi-tanoto-foundation-tingkatkan-kualitas-pendidikan>.

Telah ada sejumlah penelitian yang membahas stunting sebelum studi ini dilakukan, yaitu:

Tabel 1.3 Ringkasan Hasil Tinjauan Pustaka

Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian
Winda Anggraeni (2022)	“ <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pelaksanaan Program Penanganan Stunting (Studi Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara)”	Dalam program penanggulangan stunting, konvergensi telah dilakukan secara terorganisir antara pemangku kepentingan terkait. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, investor, swasta, dan masyarakat umum. Selain itu, pendanaan untuk penurunan stunting telah diberikan dalam jumlah yang sangat besar melalui berbagai saluran penyaluran yang sesuai dengan tanggung jawabnya, dan telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program penurunan stunting. ¹⁰
Calsha Satya Nanda (2023)	“Hubungan Kondisi Kesehatan Lingkungan dan Faktor Ibu Dengan Kejadian Stunting Balita Keluarga Petani Sawit di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022”	Penelitian telah mengindikasikan bahwa elemen-elemen seperti penggunaan toilet, sistem penanganan limbah, pengelolaan sampah, sumber serta kualitas udara, dan tingkat kepadatan penduduk tidak secara langsung berkaitan dengan kejadian stunting. Pada tahun 2022, terdapat indikasi bahwa angka stunting pada anak-anak usia balita yang berasal dari keluarga

¹⁰ Anggraeni Winda, *Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Penanganan Stunting (Studi Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara)* (Semarang: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2022).

		petani kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi mungkin akan meningkat. Keberhasilan <i>Collaborative Governance</i> dalam mengatasi masalah ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut. ¹¹
Rahmi Lestari (2022)	“ <i>Collaborative Governance</i> Dalam Program Gerakan Untuk Anak Sehat Sabang (<i>Geunaseh</i>)”	Pemerintah Kota Sabang sangat terbuka terhadap inisiatif dan inovasi yang bertujuan untuk mengurangi prevalensi stunting, yang merupakan faktor yang mendorong kerja sama. Kolaborasi antara Pemerintah Kota Sabang dengan mitra non-negara, yakni UNICEF dan Flower Aceh, berlangsung dengan lancar. Hal ini disebabkan keselarasan visi, misi, dan tujuan antara pihak-pihak tersebut. Begitu juga karena adanya rasa saling membutuhkan sumber daya. Dengan kata lain, pemerintah kota Sabang membutuhkan pihak yang membantu meningkatkan kemampuan staf pelaksana melalui pelatihan yang berbeda. ¹²

Mengacu pada informasi yang ditunjukkan dalam tabel serta hasil studi sebelumnya, terdapat diskusi terkait Stunting di Kabupaten Muaro Jambi dan juga pembahasan mengenai *Collaborative Governance* dalam konteks program untuk mengatasi stunting. Hingga saat ini, penelitian yang secara khusus membahas Bentuk *Collaborative Governance* dalam mengatasi masalah stunting di

¹¹ Calsha Satya Nanda, *HUBUNGAN KONDISI KESEHATAN LINGKUNGAN DAN FAKTOR IBU DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA KELUARGA PETANI SAWIT DI KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2022* (Jambi: Universitas Jambi, 2023).

¹² Lestari Rahmi, *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM GERAKAN UNTUK ANAK SEHAT SABANG (GEUNASEH)* (Banda Aceh: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2022).

Kabupaten Muaro Jambi belum tersedia. Atas dasar uraian tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini, yang kemudian menjadi hipotesis sementara. Penelitian ini juga akan menyelidiki bagaimana *Collaborative Governance* digunakan dalam upaya menangani stunting di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Itulah sebabnya peneliti memilih judul penelitian **“*Collaborative Governance* Dalam Mengatasi Masalah Stunting Di Kabupaten Muaro Jambi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Collaborative Governance* dalam mengatasi masalah stunting di Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apa saja tantangan dalam penerapan *Collaborative Governance* di Kabupaten Muaro Jambi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sasaran penelitian ini, sebagaimana ditetapkan dalam isu-isu yang telah dirumuskan sebelumnya:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan *Collaborative Governance* dalam mengatasi masalah stunting di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk mengetahui Apa saja Tantangan dalam penerapan *Collaborative Governance* dalam mengurangi Stunting di Kabupaten Muaro Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa manfaat yang dihasilkan dari studi ini meliputi poin-poin sebagai berikut:

1. Penelitian ini menawarkan nilai teoritis dengan memberikan wawasan tentang bagaimana pemerintah daerah berkolaborasi dalam menghadapi isu stunting di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan ilmiah yang memperkaya pengetahuan di bidang terkait.
2. Penelitian ini memiliki manfaat praktis, yaitu menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang tertarik untuk memahami bagaimana pemerintah daerah berkolaborasi dalam menangani isu stunting di Kabupaten Muaro Jambi.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori *Collaborative Governance*

Ansell dan Gash menjelaskan *Collaborative Governance* sebagai sebuah struktur yang menyatukan lembaga-lembaga publik dengan para pemangku kepentingan dari sektor swasta dalam kerangka kerja yang memungkinkan adanya proses pengambilan keputusan bersama secara terorganisir. Pendekatan ini

mengutamakan kesepakatan dan dialog untuk merancang serta menjalankan kebijakan publik.¹³

Kebijakan dan masalah publik merupakan titik utama dalam kerja sama pemerintahan¹⁴. Konsep *Collaborative Governance* mengacu pada kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan publik, dalam sebuah kerangka kerja yang memungkinkan kerja sama dengan lembaga pemerintahan untuk mencapai hasil dalam konteks pengambilan keputusan.¹⁵

Dalam mengatasi persoalan publik, terdapat sejumlah faktor yang berperan dalam munculnya *Collaborative Governance*, yaitu:

- a. Keadaan awal, atau *Starting Condition*, adalah titik di mana *Collaborative Governance* dimulai. Ini mencakup latar belakang sejarah kolaborasi sebelumnya, potensi untuk masa depan, dan manfaat yang diperoleh dari kerja sama dalam pemerintahan.
- b. *Facilitative Leadership* mencakup kesepakatan oleh entitas-entitas yang terlibat untuk menetapkan pedoman yang tegas, membangun rasa saling percaya, memberi kesempatan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pendapat, serta berbagi manfaat secara bersama-sama.

¹³ Ansell dan Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal Of Public Administration Research and Theory*. Publish by (2007): halaman 544.

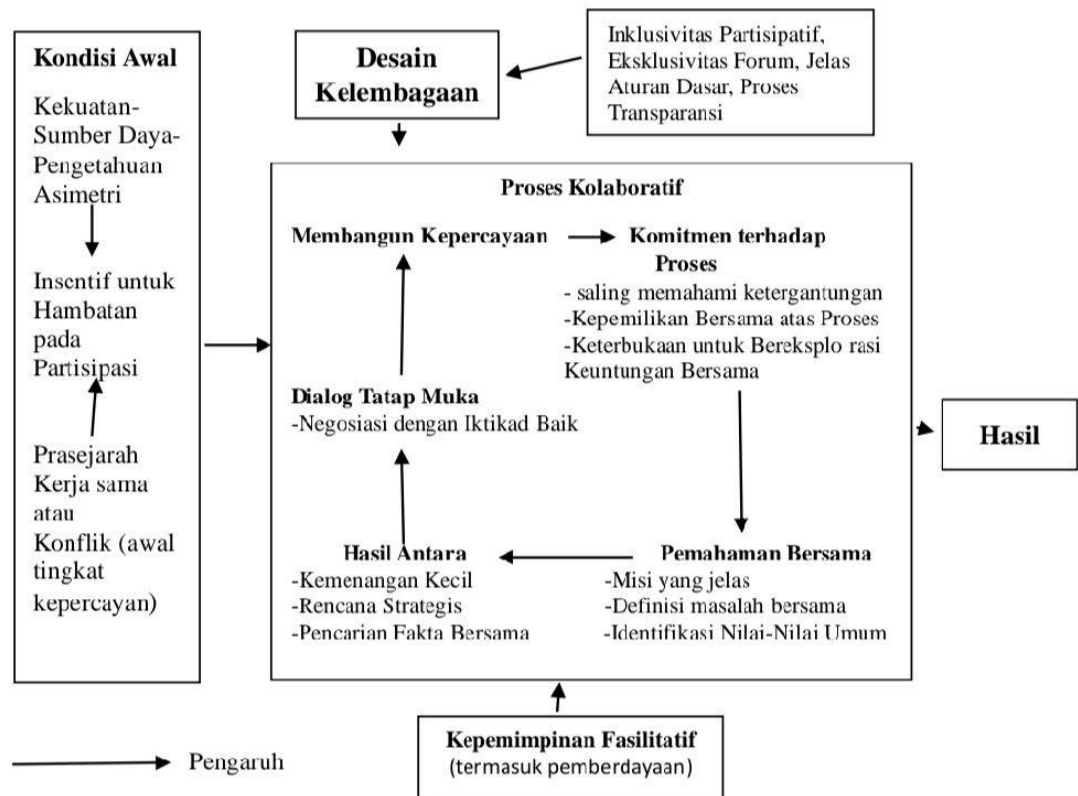
¹⁴ Maratun Saadah, "Artificial Intelligence for Smart Governance; towards Jambi Smart City," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 717, no. 1 (March 1, 2021): 012030, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012030>.

¹⁵ Suradji Adji and Setiawan Ramadhani Doerisman Asri, "Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas," *JIANA : Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 17 no 1 (2021): 71–84.

- c. *Collaborative Process* melibatkan lima tahapan, dimulai dengan dialog tatap muka di antara entitas yang berpartisipasi untuk membentuk kolaborasi yang efisien demi mencapai kesepakatan bersama. Tahapan berikutnya adalah membangun kepercayaan di antara entitas yang terlibat, sebuah langkah penting yang berkontribusi pada keberhasilan kolaborasi. Kemudian, komitmen terhadap proses, yang merupakan faktor kunci untuk mencapai tujuan bersama. Pemahaman yang saling dibagikan juga menjadi aspek krusial, di mana entitas yang terlibat perlu menyelaraskan visi, misi, tujuan, dan ideologi mereka. Tahapan terakhir, yaitu hasil sementara, adalah evaluasi awal dari proses kolaborasi yang sedang berlangsung.¹⁶

Gambar 1.1 Proses Kolaborasi Teori Ansell and Gash

¹⁶ DR> Agustinus Subarsono DR. Gabriel Lele, DR Agus Heruanto Hadna, *Kebijakan Publik Dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*, ed. Dr. Subarsono Agustinus (Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2015).



Sumber : Ansell and Gash (2007)

Gambar di atas menggambarkan proses kolaborasi yang dipengaruhi oleh 4 variabel yang telah disebutkan sebelumnya, berikut penjabaran mengenai keempat variabel dari model Ansell dan Gash.

A. Kondisi Awal

Pada kondisi ini merupakan titik penentuan dalam proses kolaborasi, karena dapat memfasilitasi atau menghambat proses kolaborasi. Lebih lanjut Ansell dan Gash menjelaskannya dengan beberapa indikator, yaitu :

1) Ketidakseimbangan Daya/Sumber Daya

Dalam indikator ini sangat diperlukan sumber daya yang kompeten seperti ketrampilan dan keahlian dibidangnya. Dalam tata kelola kolaboratif, penting bagi para pemangku kepentingan untuk memiliki kemampuan, organisasi, posisi, dan sumber daya kompetitif yang diperlukan agar dapat terlibat secara aktif. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah adanya ketidakseimbangan dalam kolaborasi yang menimbulkan adanya praktik dominan atau berkuasa dari pihak yang lebih kuat. Ansell dan Gash juga menetapkan bahwa faktor tambahan yang menghambat proses kolaborasi adalah kurangnya ketersediaan, motivasi, atau otonomi di antara para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses kolaborasi.

2) Intensif pada partisipasi

Memahami tingkat keterlibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola kolaboratif sangatlah penting. Sesuai dengan indikator sebelumnya, bahwa ketidakseimbangan kekuasaan dapat mempengaruhi intensifitas kinerja para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi. Intensif para pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi tentunya akan menghasilkan sesuatu yang berarti. Ansell dan Gash berpendapat bahwa tingkat intensitas di antara para pemangku kepentingan meningkat ketika mereka melihat hubungan yang jelas antara keterlibatan mereka dan

pencapaian hasil kebijakan yang bermakna, nyata, dan berdampak. Selain itu, tingkat keterlibatan dalam kolaborasi akan meningkat ketika para pemangku kepentingan menyadari bahwa pencapaian mereka bergantung pada kerja sama dari pemangku kepentingan lainnya.

3) Antagonism dan Kerjasama

Pada indikator ini, para pemangku kepentingan yang saling tergantung tentunya akan mengalami konflik. Namun, tingginya konflik yang terjadi di dalam proses kolaborasi sebenarnya dapat menciptakan sebuah intensif yang kuat dalam mewujudkan tata kelola *collaborative governance*. Oleh karena itu, jelas bahwa meningkatnya tingkat konflik tidak selalu menghambat proses kerja sama. Para pemangku kepentingan memahami bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka tanpa berpartisipasi dalam proses kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, meskipun kepentingan mereka sering kali berbenturan. Konflik biasanya dipicu oleh adanya perbedaan karakter dan kepentingan masing-masing para pemangku kepentingan.

B. Proses Kolaborasi

Pendekatan ini mencirikan kerja sama sebagai evolusi operasi yang progresif. Proses kerjasama dicirikan sebagai fenomena siklus yang

bergantung pada pembentukan umpan balik positif di antara banyak aspeknya. Berikut tahapan dalam dimensi proses¹⁷ :

1) Dialog tatap muka

Seluruh tata Kelola kolaboratif dibangun berdasarkan dialog tatap muka antar pemangku kepentingan. Hal ini merupakan sarana yang efektif dalam proses kolaborasi, yaitu komunikasi dengan mempertemukan secara langsung para stakeholder untuk membangun komunikasi yang mendalam. Pada proses ini berorientasi pada konsensus yaitu untuk mengidentifikasi bersama terkait kelemahan, tantangan, peluang dan keuntungan. Selain itu, inti dari proses dialog ini adalah menjalin komitmen, saling menghormati, membangun kepercayaan dan pemahaman bersama yang ingin di capai.

2) Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan merupakan bentuk perwujudan dalam proses kolaborasi. Karena para stakeholder yang memiliki kepentingan yang berbeda akan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Maka dari itu, membangun kepercayaan adalah hal yang penting, sebab cenderung akan tingginya intensif dan partisipasi untuk kesuksesan kolaborasi.

3) Komitmen pada proses

Tingkat dedikasi yang ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan terhadap tata kelola kolaboratif merupakan faktor penting

¹⁷ Ibid. h. 25

dalam menjelaskan pencapaian dan kekurangannya. Hal ini berkaitan dengan keterhubungan, transparansi, dan eksplorasi kolaboratif yang terlibat dalam mencapai kerja sama antar pemangku kepentingan. Komitmen dan proses sangat penting dengan setiap pihak yang terlibat memiliki tanggungjawab bersama terhadap proses yang telah disepakati bersama dalam musyawarah¹⁸

4) Pemahaman bersama

Dalam proses kolaborasi pada kondisi tertentu para pemangku kepentingan perlu adanya pengembangan pemahaman bersama untuk menemukan Solusi dari pemahaman tersebut. Anshell dan Gash mengidentifikasi maksud dari pemahaman bersama itu sebagai misi dan visi bersama, tujuan bersama, kesamaan, ideologi bersama, arah yang jelas dan strategis.

5) *Intermiade Outcome*

Tahapan ini merupakan hasil akhir atau penentu dalam melihat hasil proses kolaborasi. Dapat dilihat bagaimana para pemangku kepentingan meraih kesuksesan dalam kesuksesan awal, melakukan perencanaan strategis dan menemukan Solusi.

6) Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan keahlian dalam memimpin mampu memberikan pengaruh terhadap para stakeholder. Proses kolaborasi melibatkan beberapa actor yang berpengaruh dibidangnya, maka dari

¹⁸ Ibid,h.26

itu diperlukan kepemimpinan yang mampu menetapkan dan mempertahankan aturan-aturan dasar yang jelas. Bagaimana peran seorang pemimpin dalam merangkul, memberdayakan, melibatkan para stakeholder dalam memobilisasi mereka untuk memajukan kolaborasi. Selain itu pemimpin harus mempunyai ketrampilan yang dapat mendorong partisipasi, fasilitasi dinamika kelompok yang produktif, memperluang ruang lingkup proses dan mengontrol kinerja para stakeholder

7) Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan dalam konteks ini berkaitan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip mendasar yang mengatur kerja sama. Anshell dan Gash mendefinisikan desain kelembagaan sebagai seperangkat norma implementasi yang disepakati.

a) Inklusivitas Partisipati

Kolaborasi merupakan keterlibatan aktif pemerintah, sektor komersial, dan masyarakat, dimana setiap peserta mempunyai kedudukan yang setara dan berkontribusi aktif dalam pengambilan keputusan, bukan sekedar memberikan konsultasi.

b) Eksklusivitas Forum

Forum terbatas disediakan bagi stakeholder berinteraksi Dimana terdapat katagori-katagori pembahasan pada setiap forumnya. Dengan adanya forum alternatif dapat mewujudkan agenda para pemangku kepentingan,

c) Aturan Dasar yang Jelas dan Transparansi Proses

Aturan dasar pendukung kolaborasi dan transparansi merupakan aturan dasar yang jelas dan konsisten diterapkan sehingga dapat menyakinkan stakeholder jika proses yang dilakukan adil, merata dan terbuka. Hal ini berkaitan dengan transparansi dari pada stakeholder yang memang benar terwujud serta pada negosiasi bukan hanya kesepakatan 1 pihak saja namun kesepakatan bersama.

d) Penggunaan tepat waktu

Tenggat waktu dapat membatasi ruang lingkup diskusi, dan dapat melemahkan sifat dari kolaborasi karena mampu mengurangi intensifitas bekerja sama dalam jangka waktu Panjang. Maka dari itu dalam proses kolaborasi tepat waktu merupakan etika yang digunakan bagi para pemangku kepentingan, karena jadwal yang telah ditetapkan haruslah digunakan sesuai realistis

1.5.2 Konsep Stunting

"Stunting" diidentifikasi sebagai isu nutrisi yang diukur dengan menggunakan indeks tinggi badan relatif terhadap usia (TB/U), di mana

masalah ini diklasifikasikan melalui ambang batas Z-score yang berada di bawah dua standar deviasi (SD). Kondisi ini menggambarkan balita yang mengalami pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usia mereka atau memiliki tinggi badan yang lebih rendah karena kekurangan nutrisi dalam jangka panjang. Stunting menunjukkan adanya hambatan atau kegagalan pertumbuhan pada balita akibat asupan gizi yang tidak memadai.

Stunting dapat terjadi selama masa kehamilan dan biasanya terlihat lebih jelas setelah anak berusia dua tahun. Selain itu, keberadaan kondisi stunting pada anak seringkali berdampak pada kapasitas intelektual yang berada di bawah standar rata-rata, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat produktivitas mereka saat mereka berkembang menjadi tenaga kerja. Pada jangka panjang, stunting dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta berpotensi memperburuk gejala kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial.¹⁹

Ketidakmampuan untuk mengejar pertumbuhan yang terlewat serta kegagalan pertumbuhan dapat mengakibatkan bayi yang lahir dengan berat badan normal mengalami stunting. Penyebabnya adalah adanya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang tidak mencukupi, sehingga menunjukkan ketidakmampuan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang seharusnya. Ketika anak berusia dua tahun, pengobatan stunting menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, untuk mencegah

¹⁹ Situmeang Putri, "Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Pada Kasus Stunting Di Indonesia," *Jurnal PIR : Power In International Relations*, 2021, 163.

stunting, bayi dalam kandungan harus mendapatkan asupan gizi yang layak.

1.5.3 Hubungan Antara Ilmu Pemerintahan dengan Penelitian

Pemerintahan adalah suatu tatanan kelembagaan yang orang berkembang ketika mereka mulai hidup dalam kondisi menetap dan dengan populasi yang terus bertambah, sehingga mereka dapat yakin akan hal tersebut, ketertiban dan keamanan internal dan eksternal tetap dipertahankan sebisa mungkin meskipun mereka tinggal di dalamnya komunitas yang dibayangkan.²⁰

Hubungan antara penelitian tentang *Collaborative Governance* dalam mengatasi stunting dengan jurusan Ilmu Pemerintahan sangat erat, karena topik ini menyentuh beberapa aspek penting yang dipelajari dalam bidang Ilmu Pemerintahan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan tersebut:

A. Kebijakan Publik

Collaborative Governance seringkali diterapkan dalam konteks kebijakan publik, di mana berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, sektor swasta) bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam mengatasi stunting, kebijakan publik yang efektif sangat penting, dan mahasiswa Ilmu Pemerintahan mempelajari bagaimana kebijakan ini dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi.

²⁰ Raadschelders and Stillman, *Theory and Scope of the Study of Public Administration* (Irvine, CA: Melvin & Leigh Publisher, 2017).

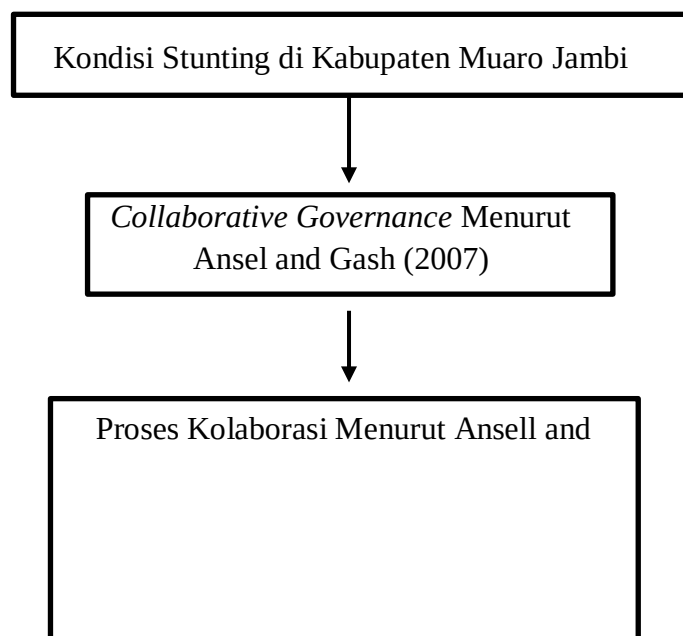
B. Governance dan Pengambilan Keputusan:

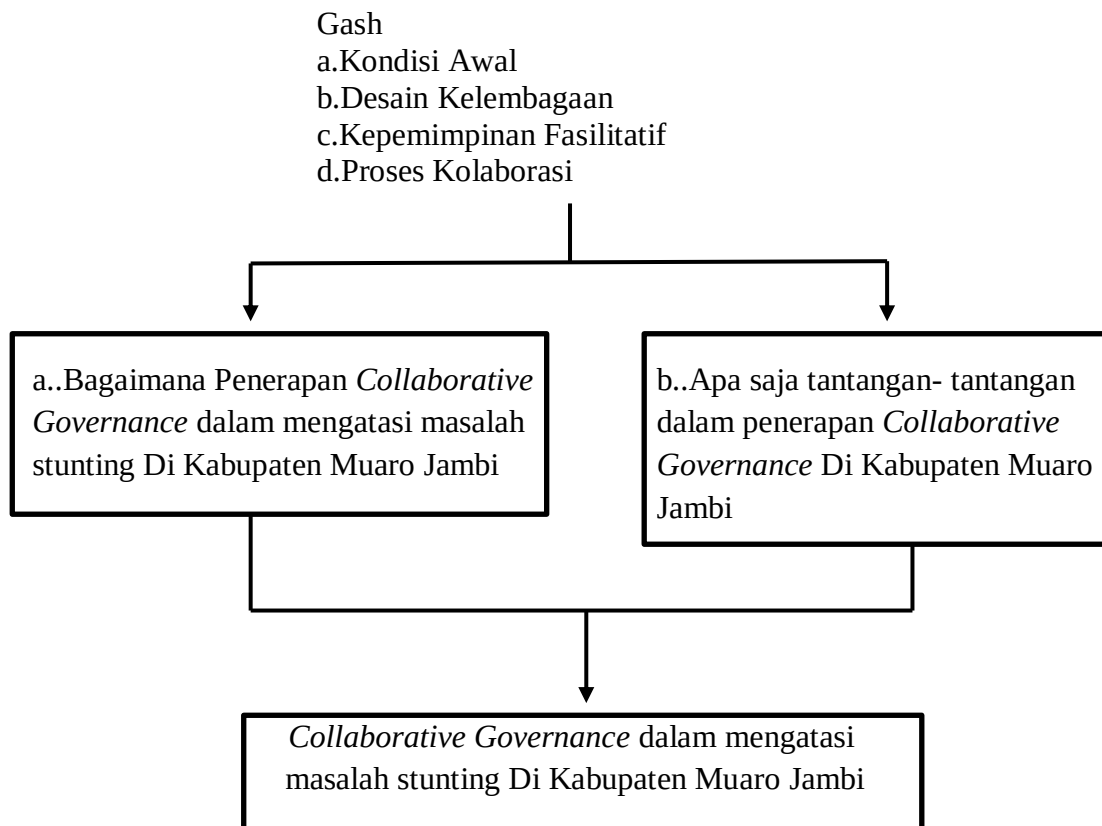
Collaborative Governance mencakup aspek-aspek tentang tata kelola dan pengambilan keputusan bersama. Ini relevan dengan studi Ilmu Pemerintahan yang sering membahas tentang teori dan praktik tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi lintas sektor.

1.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang serta landasan teori dalam penelitian ini, maka secara detail akan terlihat pada kerangka berpikir dibawah ini :

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir





Sumber :gambar olahan peneliti

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode akan diterapkan pendekatan kualitatif.. Seperti dijelaskan oleh Meleong (2002), tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk menggali dan memahami berbagai fenomena yang dialami subjek penelitian, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan mereka.²¹

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui metode triangulasi, yang mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagaimana diuraikan oleh Sugiono (2017). Pendekatan ini, yang tergolong dalam filsafat postpositivisme atau interpretatif, bertujuan untuk menyelidiki kondisi alami suatu objek penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dalam penelitian ini biasanya bersifat kualitatif dan analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif. Peran peneliti dalam konteks ini adalah sebagai instrumen kunci. Keberhasilan metode kualitatif terletak pada kemampuannya untuk memahami makna, keunikan, membentuk fenomena, dan mengembangkan hipotesis.²²

Dari uraian di atas, dapat diartikulasikan bahwa tujuan penelitian ini adalah menyediakan analisis yang mendalam dan deskriptif mengenai "*Collaborative Governance*" Daerah dalam menghadapi tantangan stunting di Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk

²¹ Lexy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Fan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

mengadopsi pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena yang dijadikan fokus studi secara sistematis dan detail, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih luas.

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif diidentifikasi sebagai metodologi yang efektif untuk menghasilkan deskripsi rinci mengenai fenomena yang diteliti, yang berperan penting dalam memperdalam pemahaman terkait subjek yang diteliti.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini mengambil tempat di Kabupaten Muaro Jambi, terutama menggali mengenai bagaimana penerapan *Collaborative Governance* dalam mengatasi stunting di Kabupaten Muaro Jambi. Lokasi penelitian ini berada Di Kabupaten Muaro Jambi yaitu Di Sengeti tepatnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Tanoto Foundation atau yang mewakili yaitu Komisi Perempuan Indonesia Jambi yang berlokasi di Kota Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menghindari cakupan yang terlalu luas, oleh karena itu para peneliti menentukan beberapa fokus tertentu dalam riset ini, yaitu:

- 1) Bagaimana bentuk kerjasama antara pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan Tanoto Foundation dalam penanganan masalah stunting.

- 2) Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja tantangan-tantangan dari *Collaborative Governance* dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Muaro Jambi.

1.7.4 Sumber Data

A. Data Primer

Informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian melalui metode wawancara dan observasi dengan individu di tempat penelitian merupakan data primer.²³

Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yang berpartisipasi langsung dalam proses kolaborasi, mengikuti pedoman wawancara yang berlandaskan pada teori *Collaborative Governance*. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kolaborasi yang terjadi di antara berbagai pihak yang terlibat. Pertanyaan dalam wawancara dirancang untuk menguraikan masalah penelitian dan menemukan jawaban atasnya. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan memberikan wawasan tentang keberhasilan atau tantangan dalam proses kolaborasi yang sedang diteliti.

Data primer yang diperoleh meliputi berbagai bentuk dokumentasi hasil wawancara, seperti foto, rekaman audio, dan transkrip wawancara yang didapat dari para informan.

B. Data Sekunder

²³ M. Ikbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, 2002).

Informasi yang diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber seperti catatan, publikasi, dokumen, literatur, dan laporan, serta materi pustaka lain yang berhubungan secara tidak langsung dengan objek penelitian, merupakan sumber data sekunder.

Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber didukung dan diperkaya oleh data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. Data ini mencakup laporan dan dokumentasi dari berbagai proses kolaborasi antar beberapa pihak yang dilaporkan oleh media, notulen forum kolaborasi, data para pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata secara langsung maupun tidak langsung, serta daftar hadir mereka yang terlibat dalam kegiatan kolaborasi, di antara sumber-sumber lainnya.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, sampel dipilih melalui teknik Purposive Sampling. Informan yang memiliki pemahaman mendalam tentang subjek yang diteliti dan yang dapat menyediakan informasi penting untuk mendapatkan data yang akurat dipilih oleh peneliti. Informan yang terpilih adalah mereka yang dianggap memegang kendali atau memiliki pemahaman yang mendalam tentang informasi yang esensial, sehingga mereka dapat membantu peneliti dalam mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pihak-pihak yang akan bertindak sebagai informan penelitian telah diidentifikasi sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Bagian Kerjasama

Sekretaris Daerah tepatnya bagian kerjasama disini sebagai yang memiliki arsip ataupun data MOU penandatanganan antara Tanoto Foundation dengan pihak DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana).

b. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Muaro Jambi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Muaro Jambi disini berperan sebagai pihak yang menjalankan kerjasama dan juga pihak yang menandatangani MOU kerjasama. Sehingga wawancara data-data wawancara banyak diperoleh dari pihak DPPKB ini.

d. Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi

Dinas kesehatan Muaro Jambi disini memiliki data mengenai angka stunting se-Kabupaten Muaro Jambi di masing-masing Desa.

e. Ketua KPI (Komisi Perlindungan Perempuan) Jambi

Ketua KPI Jambi disini berperan sebagai pihak ke 3 yang diberikan wewenang oleh Tanoto Foundation untuk turun langsung dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama.

f. Tanoto Foundation

Tanoto Foundation disini memiliki peran sebagai pihak swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Informasi yang lebih akurat tentang objek penelitian diperoleh melalui pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan metode observasi. Strategi yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan untuk mengurangi jumlah kasus stunting di Kabupaten Muaro Jambi telah diobservasi dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Salah satu teknik dalam mengumpulkan data adalah wawancara, yang melibatkan pemberian rangkaian pertanyaan kepada narasumber seputar subjek yang sedang diteliti. Dalam konteks lain, wawancara dapat didefinisikan sebagai proses interaksi verbal antara dua pihak atau lebih yang berlangsung secara tatap muka dengan tujuan mengumpulkan data terkait subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Untuk membantu mendapatkan data tambahan, diperlukan adanya dokumentasi. Teknik dokumentasi dapat digunakan sebagai sumber untuk menganalisis masalah. Dokumentasi tentang penelitian kasus stunting dapat berupa tulisan, rekaman, ataupun gambar.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, pendekatan model analisis data interaktif yang meliputi tiga tahap utama digunakan untuk mengolah ulang kedua jenis sumber data tersebut, yaitu data primer dan sekunder. Tahap pertama

melibatkan proses kondensasi data, diikuti oleh penyajian data, dan tahap akhir adalah menarik kesimpulan serta verifikasi. Semua langkah ini dijalankan secara simultan untuk mendapatkan hasil yang optimal.²⁴

- a. Reduksi Data, Data yang diperoleh peneliti dari berbagai narasumber kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan penelitian selanjutnya. Data lalu dipilih berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan indikator penelitian.
- b. Penyajian Data, Data yang sebelumnya telah dikelompokkan disajikan sesuai kebutuhan
- c. Penarikan Kesimpulan (verifikasi) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan memastikan kebenaran data yang diperoleh di lapangan sehingga validitasnya dapat terjamin sesuai fakta yang ada di lapangan.

1.7.8 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Metode triangulasi menggabungkan satu metode dengan metode lain untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi data memungkinkan validasi data dengan membandingkan dan memverifikasi hasil data dari berbagai sumber. Selain itu, peneliti melakukan pengamatan dan wawancara berulang kali untuk memastikan bahwa data yang mereka peroleh konsisten..²⁵

Triangulasi data adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil dengan menggabungkan

²⁴ Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis* (America : Sage Publication, 2014).

²⁵ Ibid. Hal 78-83

beberapa sumber data, metode, teori, atau peneliti yang berbeda. Dalam konteks penelitian tentang *Collaborative Governance* dalam mengatasi stunting, triangulasi data sangat berguna untuk memastikan bahwa hasil penelitian akurat dan mencerminkan realitas di lapangan dari berbagai perspektif yang relevan.